BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan yang mampu penulis utarakan adalah:

1. Pengaturan jaksa pengacara negara sebagai perwakilan pemerintah di Indonesia tidak dirumuskan dengan mendetail pada UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahkan sampai revisi terakhir yaitu UU No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menyebutkan secara jelas tentang batasan pengertian Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara hanya diserahkan tugas melalui surat kuasa khusus untuk menegakkan hukum serta memberikan bantuan hukum, atau didasarkan atas surat perintah untuk memberikan pertimbangan hukum dalam hukum lain, juga memberikan layanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Kewenangan jaksa sebagai jaksa pengacara negara adalah jaksa pengacara negara selaku pegawai pemerintah pada sektor hukum, bertugas mewakili Negara maupun pemerintah dalam memberikan penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, juga pendampingan hukum untuk kepentingan Negara. Kejaksaan melalui jaksa pengacara negara dibidang perdata dan tata usaha negara dapat berperan pada penyelamatan kekayaan Negara serta memberikan perlindungan atas kepentingan Negara baik didalam peradilan maupun diluar peradilan. Meskipun demikian,

pemahaman terhadap tugas Jaksa Pengacara Negara masih belum dipahami sebagian lembaga pemerintah dan BUMN/BUMD.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, adapun saran penulis yaitu:

1. Perlunya perincian tentang jaksa pengacara negara khususnya pada undang-undang Kejaksaan karena jaksa selaku pengacara negara pada konteks ini mewakili Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga pemerintah daerah.
2. Kejaksaan melalui tugas serta fungsi jaksa pengacara negara dengan meningkatkan kerjasama terhadap berbagai seluruh elemen, seperti instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, BUMN/BUMD seperti dalam Mou (*Memorandum of Understanding*) maupun bantuan hukum lainnya. Dengan demikian, banyak pihak seperti lembaga Pemerintah dan Negara, BUMN, (BUMD), dan masyarakat umum banyak yang mengetahui mengenai perananan Kejaksaan pada tata usaha negara dan bidang perdata